

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Jika pada tahun 2011, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,40 %, maka pada 2012 bisa melampaui 6,70 %. Hal tersebut bisa dicapai apabila pemerintah Indonesia melakukan reformasi secara menyeluruh pada berbagai bidang termasuk pembenahan infrastruktur, transportasi, listrik, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, air minum, sanitasi, dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi pasar yang potensial. Kondisi tersebut tentu bisa dijadikan pemacu pengembangan industri dan transportasi, khususnya pengembangan perkeretaapian Indonesia (Kereta Api Indonesia, 2012: 50).

Beberapa tahun terakhir, manajemen perusahaan banyak yang mengkhawatirkan timbulnya kecurangan (*fraud*) di lingkungan perusahaannya akibat dari krisis global. Krisis global telah menggerus laba BUMN dan menyebabkan konglomerat Indonesia kehilangan sekitar 60 % kekayaannya, dan juga telah mengakibatkan kurang lebih 30.000 pekerja kehilangan pekerjaan/penghasilan (Purna, dkk, 2009).

Pasca krisis, harapan besar pemulihan ekonomi dikembalikan pada BUMN serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dengan demikian, sangat wajar BUMN diharapkan menjadi lokomotif penggerak ekonomi Indonesia (Akbar, 2014).

Kecurangan di BUMN dapat menyebabkan kerugian negara, karena menurut Akbar (2014), kerugian negara merupakan akibat dari perbuatan yang bersifat melawan hukum melalui penyalahgunaan wewenang, kesempatan dari seseorang atau korporasi untuk memperkaya diri sendiri. Intinya, kerugian keuangan negara merupakan akibat dari tindak pidana korupsi dengan modus melawan hukum dan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atau bisa disingkat PT. KAI, merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang jasa transportasi angkutan darat yang produk jasanya yaitu sarana transportasi kereta api yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan kegiatannya, PT. KAI memiliki beberapa fenomena kecurangan, diantaranya adalah mantan Kepala Daerah Operasi (Daops) 6 PT. KAI berinisial YR serta DS sebagai rekanan dari PT. Daya Hasta, keduanya terlibat kasus korupsi renovasi Stasiun Lempuyangan pada 2008. Mereka berdua membuat laporan, bahwa pekerjaan sudah selesai 100 %. Pada kenyataannya setelah diuji dan diselidiki, terdapat kekurangan atau ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan (www.tribunjogja.com, diakses pada tanggal 9 Pebruari 2014).

Berikutnya adalah korupsi pengadaan genset pada tahun 2009, PT. KAI waktu itu berencana membeli 8 unit genset 500 kVa dengan anggaran Rp 6,90 miliar. Mantan Kadaop berinisial A kemudian bersepakat dengan dua terdakwa yang merupakan pengusaha dengan mengajukan genset 500 kVa yang spesifikasinya sesuai kebutuhan PT. KAI. Harga yang mereka ajukan yaitu Rp

1,49 miliar per unit. Karena tak sesuai dengan pagu anggaran, PT. KAI hanya bisa membeli 5 unit genset. Harga 5 unit genset tersebut lebih mahal Rp 2,10 miliar dari harga aslinya, sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 2,50 miliar (www.detik.com, diakses pada tanggal 10 Pebruari 2014).

Tidak bisa dipungkiri bahwa pendeteksian kecurangan dalam fenomena tersebut dapat mencerminkan seberapa memadainya peranan Audit Internal dalam suatu perusahaan. Terdapatnya jarak waktu dari kecurangan tersebut dilakukan hingga dapat terdeteksi memberikan arti bahwa juga terdapat waktu pelaku kecurangan tersebut berkesempatan menghilangkan jejaknya. Adanya resiko kecurangan mengharuskan internal auditor untuk menyusun tindakan pencegahan (*prevention*) untuk menangkal terjadinya kecurangan. Namun, pencegahan saja tidaklah memadai, internal auditor harus memahami pula bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan-kecurangan yang timbul (Amrizal, 2004: 12), karena setelah kecurangan dapat terdeteksi, maka kecurangan tersebut dapat dijadikan pelajaran untuk mengantisipasi dan mencegah kecurangan terjadi di masa depan. Penerapan sistem pengendalian intern yang efektif dan pengelolaan risiko perusahaan secara terpadu menjadi sangat penting mengingat jumlah aset negara yang dikelola oleh BUMN sangat signifikan (Badan Pemeriksa Keuangan, 2013).

Di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) audit internal dalam penerapannya salah satunya ada dalam fungsi dan tugas Satuan Pengawasan Intern (Kereta Api Indonesia, 2012: 168). Dari hasil kegiatan yang dilaksanakan Satuan Pengawas Intern pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sampai dengan tanggal 31

Desember 2012 masih menyisakan 213 temuan yang belum terselesaikan dari total 339 temuan yang didapat dari 15 objek audit (Kereta Api Indonesia, 2012: 169). Menurut Akbar (2014), seiring meningkatnya persaingan bisnis secara global, wajar jika pengawasan memiliki peran sangat penting demi menjaga keberlangsungan entitas bisnis. Namun Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari mengungkapkan, salah satu kelemahan lembaga-lembaga tinggi negara di Indonesia adalah lemahnya kinerja Satuan Pengawasan Internal. Buktinya, meski setiap instansi memiliki Satuan Pengawas Internal namun korupsi masih marak terjadi (Jawa Pos Nasional Network, 2013).

Pihak manajemen dan pihak auditor internal mempunyai fungsi yang berbeda dalam hal mendeteksi kemungkinan terjadinya *fraud*. Secara normatif fungsi Audit Internal adalah memberikan jasa penilaian yang independen, menguji dan melakukan evaluasi kegiatan perusahaan. Sedangkan dalam usaha mendeteksi *fraud*, fungsi auditor internal adalah membantu pihak manajemen dalam melaksanakan tugasnya dengan cara melengkapi mereka dengan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi dan penyuluhan tentang masalah yang sedang dikaji (Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004: 71).

Walaupun auditor internal tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan saksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan (Amrizal, 2004: 9).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Audit Internal Dalam Pendeteksian Kecurangan (Studi Kasus Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka pembahasan akan dititikberatkan pada masalah pokok yang diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Bagaimana Audit Internal pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung.
- b. Bagaimana pendeteksian kecurangan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung.
- c. Peranan Audit Internal dalam pendeteksian kecurangan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan peranan Audit Internal dalam pendeteksian kecurangan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung. Data dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi untuk memenuhi persyaratan dalam ujian sidang sarjana pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Audit Internal pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung.
- b. Untuk mengetahui pendeteksian kecurangan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung.
- d. Untuk mengetahui peranan Audit Internal dalam pendeteksian kecurangan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi:

- a. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan perbandingan antara teori yang didapat selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi di lapangan dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

- b. Perusahaan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung mengenai peranan Audit Internal dalam pendeteksian kecurangan.

c. Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi, khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung yang merupakan perusahaan manufaktur sarana kereta api. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ini berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung 40117, dilaksanakan sejak bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014.